

# LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018 (AUDITED)

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl. Muh. Van Gobel No.270 Desa Iloheluma Kec. Tilong Kabila

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 6 Mei 2024

Sumarni Panikkai, Pengguna Anggaran,



Sumarni Panikkai, SP, M.Si  
NIP.197309152006042008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	
I.	Laporan Realisasi Anggaran
II.	Neraca
III.	Laporan Operasional
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas
V.	Catatan atas Laporan Keuangan
A	Penjelasan Umum
B	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.2	Belanja
B.3	Belanja Pegawai
B.4	Belanja Barang
B.5	Belanja Modal
B.5.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
B.5.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
B.5.4	Belanja Modal Lainnya
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1	Aset Lancar
C.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1.2.	Persediaan
C.2	Aset Tetap
C.2.1.	Tanah
C.2.2.	Peralatan dan Mesin
C.2.3.	Gedung dan Bangunan
C.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.3	Piutang Jangka Panjang
C.4	Aset Lainnya
C.4.1.	Aset Tak Berwujud
C.4.2.	Aset Lain-lain
C.4.3.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
C.5	Kewajiban Jangka Pendek
C.5.1.	Uang Muka dari KPPN
C.6	Ekuitas
C.6.1.	Ekuitas
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

	D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
	D.2	Beban Pegawai
	D.3	Beban Persediaan
	D.4	Beban Barang dan Jasa
	D.5	Beban Pemeliharaan
	D.6	Beban Perjalanan Dinas
	D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
E		Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	E.1	Ekuitas Awal
	E.2	Surplus/Defisit-LO
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
	E.3.1	Koreksi Atas Reklasifikasi
	E.4	Transaksi Antar Entitas
	E.4.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
	E.5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas
	E.5	Ekuitas Akhir
F		Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
	F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
	F.2	Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 6 Mei 2024



Pengguna Anggaran,

Samarni Panikkai, SP, M.Si

NIP.197309152006042008

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp200.438.764,00 atau mencapai 161% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp124.755.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp6.035.929.112,00 atau mencapai 95,47 % dari alokasi anggaran sebesar Rp6.322.226.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.011.979.428,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.537.783,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.59.948.316,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.932.869.964,00

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 121.145.140,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.158.721.891,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.037.576.751,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp166.144.500,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-,4.871.432.251, 00

#### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp15.215.129.785,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-4.871.432.251,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.500.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.382.487.894,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14.728.685.428,00.

#### V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	124.755.000,00	200.438.764,00	161	124.543.037,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>124.755.000,00</b>	<b>200.438.764,00</b>	<b>161</b>	<b>124.543.037,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	2.973.497.000,00	2.894.975.455,00	97	3.035.970.518,00
Belanja Barang	B.4.	3.274.009.000,00	3.066.383.657,00	94	2.811.425.553,00
Belanja Modal	B.5.	74.720.000,00	74.570.000,00	100	105.274.060,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>6.322.266.000,00</b>	<b>6.035.929.112,00</b>	<b>95</b>	<b>5.952.670.131,00</b>

## II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Persediaan	C.1.1.	0,00	5.332.500,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.332.500,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	1.065.826.022,00	1.065.826.022,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6.425.561.613,00	6.854.691.613,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	14.450.425.271,00	14.450.425.271,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.377.530.675,00	1.377.530.675,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	61.520.000,00	61.520.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-8.845.579.694,00	-8.668.116.390,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.537.783.887,00</b>	<b>15.141.877.191,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	31.015.000,00	31.015.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	587.253.000,00	164.469.003,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-558.319.684,00	-127.563.909,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>59.948.316,00</b>	<b>67.920.094,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>14.597.732.203,00</b>	<b>15.215.129.785,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.4.1.	14.597.732.203,00	15.215.129.785,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>14.597.732.203,00</b>	<b>15.215.129.785,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>14.597.732.203,00</b>	<b>15.215.129.785,00</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	188.073.764,00	124.542.929,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>188.073.764,00</b>	<b>124.542.929,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	2.894.975.455,00	3.035.970.518,00
Beban Persediaan	D.3.	428.272.876,00	560.113.410,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.982.188.193,00	1.659.124.098,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	294.962.716,00	296.580.135,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	572.996.372,00	451.619.910,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	689.135.082,00	891.540.327,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.862.530.694,00</b>	<b>6.895.678.398,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-6.674.456.930,00</b>	<b>-6.771.135.469,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	219.069.000,00	155.887.608,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>219.069.000,00</b>	<b>155.887.608,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>		<b>-6.455.387.930,00</b>	<b>-6.615.247.861,00</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	15.215.129.785,00	16.012.238.552,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-6.455.387.930,00	-6.615.247.861,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	2.500,000,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	5.835.490.348,00	5.828.127.094,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	-617.397.582,00	-787.120.767,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>14.597.732.203,00</b>	<b>15.225.117.785,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

<b>A.1.</b>	<b>Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo</b>
-------------	--

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo (BSIP Gorontalo) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Bab. I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BSIP Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

<b>A.2.</b>	<b>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</b>
-------------	---

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporannya yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

<b>A.3.</b>	<b>Basis Akuntansi</b>
-------------	------------------------

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

<b>A.4.</b>	<b>Dasar Pengukuran</b>
-------------	-------------------------

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

<b>A.5.</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>
-------------	----------------------------

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>

## (2) Pendapatan - LO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>

## (3) Belanja

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ul>

## (4) Beban

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ul>

## (5) Aset

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.</li> </ul>
--	---

	<b>a</b>	<b>Aset Lancar</b>
	.	
	•	Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
	•	Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
	•	Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

	•	Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
--	---	--

	<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
	Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
	Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
	Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
		2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

	•	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
	•	Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
		harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
		harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

	harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
--	---

	<b>b Aset Tetap</b>
	.
	• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
	• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
	• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
	• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

	• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
	• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

	<b>c Penyusutan Aset Tetap</b>
	.
	• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
	• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:</li> </ul>

	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
	Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
	Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
	Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
	Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

	<b>d Piutang Jangka Panjang</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</li> <li>Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.</li> </ul>

	<b>e Aset Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.</li> <li>Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.</li> <li>Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.</li> <li>Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman</li> </ul>

	Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
--	--

	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
	Software Komputer	04
	Franchise	05
	Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
	Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
	Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
	Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

	• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
--	--

## (6) Kewajiban

	• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
	• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

	• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
--	---

## (7) Ekuitas

	• Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu
--	---

	periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
--	--

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
	<b>Pendapatan</b>		
	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	124.755.000,00	124.755.000,00
	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>124.755.000,00</b>	<b>124.755.000,00</b>
	<b>Belanja</b>		
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.833.150.000,00	283.9637.000,00
	Belanja Lembur	111.850.000,00	111.850.000,00
	Belanja Barang Operasional	904.300.000,00	871.300.000,00
	Belanja Barang Non Operasional	402.645.000,00	887.326.000,00
	Belanja Barang Persediaan	99.200.000,00	227.283.000,00
	Belanja Jasa	237.600.000,00	326.410.000,00
	Belanja Pemeliharaan	281.400.000,00	291.790.000,00
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	283.650.000,00	669.900.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	74.720.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.153.795.000,00</b>	<b>6.322.226.000,00</b>

**B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 200.438.764,00 atau mencapai 161% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 124.755.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	.%
	<b>Akun Pendapatan</b>			
	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	120.075.000,00	180.875.200,00	96
	Pendapatan Lain-Lain	0,00	12.365.000,00	0,00
	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.680.000,00	7.198.564,00	113
	<b>Jumlah</b>	<b>124.755.000,00</b>	<b>200.438.764,00</b>	<b>161</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 161% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	180.875.200,00	117.545.500,00	53,88
	Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lain-Lain	12.365.000,00	108,00	114
	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	7.198.564,00	6.997.429,00	2,87
	<b>Jumlah</b>	<b>200.438.764,00</b>	<b>124.543.037,00</b>	<b>60,94</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.025.929.112,00 atau 95% dari anggaran belanja sebesar Rp6.322.226.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	.%
	<b>Akun Belanja</b>			
	Belanja Pegawai	2.973.497.000,00	2.894.975.455,00	97
	Belanja Barang	3.274.009.000,00	3.066.383.657,00	94
	Belanja Modal	74.720.000,00	74.570.000,00	100
	<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>6.322.226.000,00</b>	<b>6.035.929.112,00</b>	<b>95</b>
	<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>6.322.226.000,00</b>	<b>6.035.929.112,00</b>	<b>95</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 95% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain Karena Adanya pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS/Tunjangan Fungsional serta pembulatan Gaji dan Telah disetorkan ke Kas Negara melalui SPM sehingga terdapat Selisih.

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
	Belanja Pegawai	2.973.497.000,00	3.035.970.518,00	-2,06%
	Belanja Barang	3.274.009.000,00	2.811.425.553,00	16,54%
	Belanja Modal	74.720.000,00	105.274.060,00	-29,02%
	<b>Total Belanja</b>	<b>6.322.226.000,00</b>	<b>5.952.670.131,00</b>	<b>6,21%</b>

## B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.877.775.461,00 dan Rp3.036.711.710,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.765.945.426,00	2.952.020.114,00	-6,30%
	Belanja Lembur	111.829.000,00	84.321.000,00	32,62%
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.877.774.426,00</b>	<b>3.036.341.114,00</b>	<b>-5,22%</b>
	<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>1.035,00</b>	<b>370.416,00</b>	<b>-99,72 %</b>
	<b>Belanja</b>	<b>2.877.775.461,00</b>	<b>3.036.711.710,00</b>	<b>-5,23%</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.279.658.309,00 dan Rp1.899.084.232,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 20,04% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh Adanya penambahan Anggaran

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Belanja Barang Operasional	870.171.367,00	810.610.050,00	7,35
	Belanja Barang Non Operasional	810.577.754,00	615.060.778,00	37,79
	Belanja Barang Persediaan	219.760.076,00	394.113.410,00	-44,24
	Belanja Jasa	301.439.072,00	243.441.270,00	23,82
	Belanja Pemeliharaan	291.439.016,00	296.580.135,00	-1,73
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	572.996.372,00	451.619.910,00	26,88
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.066.383.657,00</b>	<b>2.811.425.553,00</b>	<b>9,07</b>
	<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.066.383.657,00</b>	<b>2.811.425.553,00</b>	<b>09,07</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.570.000,00 dan Rp105.274.060,00,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar -29,17% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.570.000,00	105.274.060,00	-29,17
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0
	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>74.570.000,00</b>	<b>105.274.060,00</b>	<b>-29,17</b>
	<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>74.570.000,00</b>	<b>105.274.060,00</b>	<b>-29,17</b>

### B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan 0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2022. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

<b>C.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	
	<b>C.1.1</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp120.00.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Nilai UP	60.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.000.000,00</b>

	<b>C.1.2</b>	<b>Persediaan</b>
--	--------------	-------------------

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp5.332.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Persediaan per 30 September 2023 dan 30 September 2022

	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	Bahan Baku	0,00	5.332.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.500,00</b>

<b>C.2.</b>	<b>ASET TETAP</b>	
	<b>C.2.1</b>	<b>Tanah</b>

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.065.826.022,00 dan Rp1.065.826.022,00.

	<b>C.2.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
--	--------------	----------------------------

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.425.561.613,00 dan Rp6.854.691.613,00.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>6.425.561.613,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>6.425.561.613,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-5.910.401.972,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>515.159.641,00</b>

	<b>C.2.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
--	--------------	----------------------------

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.450.425.271,00 dan Rp14.450.425.271,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>14.450.425.271,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Masuk	0,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Keluar	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>14.450.425.271,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2023	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>14.450.425.271,00</b>

	<b>C.2.4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
--	--------------	------------------------------------

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.377.530.675,00 dan Rp1.377.530.675,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.377.530.675,00</b>
	<b>Mutasi Tambah</b>	
	Pengembangan Nilai Aset	0,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.377.530.675,00</b>
	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
	<b>Nilai Buku p per 31 Desember 2023</b>	<b>1.377.530.675,00</b>

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<b>C.2.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
--	--------------	---------------------------

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61.520.000,00 dan Rp61.520.000,00. Nilai Aset Lainnya tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan

	<b>C.2.6</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>
--	--------------	--

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp- 8.845.579.694,00 dan Rp-8.668.116.390,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	1.	Peralatan dan Mesin	6.854.691.613,00	-5.706.908.673,00	1.147.782.940,00

	2.	Gedung dan Bangunan	14.450.425.271,00	-2.114.392.851,00	12.336.032.420,00
	3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.377.530.675,00	-1.024.278.170,00	353.252.505,00
	4.	Aset Tetap Lainnya	61.520.000,00	0,00	61.520.000,00
		<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>22.315.037.559,00</b>	<b>-8.845.579.694,00</b>	<b>13.898.587.865,00</b>

<b>C.4.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	
	<b>C.4.1</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.015.000,00 dan Rp31.015.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
	Software	31.015.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.015.000,00</b>
	<b>C.4.2</b>	<b>Aset Lain-lain</b>

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp587.253.000,00 dan Rp164.469.003,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo serta dalam proses penghapusan dari BMN.

	<b>C.4.3</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</b>
--	--------------	---

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp- 558.319.684,00 dan Rp-127.563.909,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	1.	Aset Tak Berwujud	31.015.000,00	-24.790.000,00	-6.225.000,00
	2.	Aset Lain-lain	587.253.000,00	-529.543.795,00	-57.709.205,00
		<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>618.268.000,00</b>	<b>-554.333.795,00</b>	<b>-63.934.205,00</b>

<b>C.5.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
	<b>C.5.1</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

<b>C.6.</b>	<b>EKUITAS</b>	
	<b>C.6.</b>	<b>Ekuitas</b>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 14.597.732.203,00 dan Rp15.215.129.785,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.132.922.676,00 dan Rp.96.466.839,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	90.000,00	-100,00
	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	180.875.200,00	117.455.500,00	53,99
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.198.564,00	6.997.429,00	2,87
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.365.000,00	108	12,07
	<b>Jumlah</b>	<b>200.922.676,00</b>	<b>124.543.037,00</b>	<b>60,94</b>

1. Pendapatan penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa penjualan hasil UPBS berupa benih dan Ayam (DOC)
2. Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan bangunan berupa sewa bangunan rumah pegawai
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Kelebihan pembayaran tunjangan pegawai khusus Pegawai Tugas Belajar

**D.2. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.877.773.391,00 dan Rp.3.030.323.664,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 30 September 2023	Realisasi 30 September 2022	Naik (Turun) %
	Beban Gaji Pokok PNS	1.870.760.140,00	1.956.268.280,00	-4,37
	Beban Pembulatan Gaji PNS	27.850,00	32.650,00	-14,70
	Beban Tunj. Anak PNS	40.002.392,00	42.657.190,00	-6,22
	Beban Tunj. Beras PNS	116.378.940,00	124.489.980,00	-6,52
	Beban Tunj. Fungsional PNS	238.060.000,00	311.150.000,00	-23,47
	Beban Tunj. PPh PNS	4.915.305,00	56.46.854,00	-12,95
	Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	24.480.000,00	2,94
	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122.127.764,00	129.759.564,00	-5,88
	Beban Tunjangan Umum PNS	49.175.000,00	47.385.000,00	3,78
	Beban Uang Lembur	111.829.000,00	84.321.000,00	32,62
	Beban Uang Makan PNS	299.297.000,00	309.780.000,00	-3,38
	<b>Jumlah</b>	<b>2.877.773.391,00</b>	<b>3.030.323.664,00</b>	<b>-5,03</b>

<b>D.3.</b>	<b>Beban Persediaan</b>
-------------	-------------------------

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp181.001.400,00 dan Rp280.629.366,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Beban Persediaan bahan baku	317.659.976,00	216.564.175,00	46,68
	Beban Persediaan konsumsi	110.591.400,00	343.549.235,00	-67,81
	Beban persediaan lainnya	21.500,00	0,00	-100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>428.272.876,00</b>	<b>560.113.410,00</b>	<b>-23,54</b>

Beban Persediaan tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022 karena Nilai untuk Beban Persediaan Konsumsi realisasi sedikit sehingga Perbandingan Beban Persediaan beda dengan tahun 2022

<b>D.4.</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>
-------------	------------------------------

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.195.7892.070,00 dan Rp1.639.124.098,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Beban Bahan	575.455.754,00	387.140.778,00	2,74
	Beban Barang Non Operasional Lainnya	194.622.000,00	190.120.000,00	2,37
	Beban Barang Operasional Lainnya	105.296.330,00	3.000.000,00	3409,88
	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102.000.000,00	94.800.000,00	7,59
	Beban Honor Output Kegiatan	40.500.000,00	37.800.000,00	7,14
	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	850.000,00	-100
	Beban Jasa Konsultan	45.000.000,00	20.000.000,00	125
	Beban Jasa Profesi	31.400.000,00	19.000.000,00	65,26
	Beban Keperluan Perkantoran	624.406.437,00	649.845.150,00	-3,91
	Beban Langganan Air	3.685.000,00	4.922.000,00	-35,13
	Beban Langganan Listrik	206.682.380,00	164.300.021,00	25,80
	Beban Langganan Telepon	67.169,00	669.249,00	89,96
	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.674.000,00	52.976.900,00	-83,63
	Beban Sewa	14.000.000,00	33.700.000,00	-58,46
	<b>Jumlah</b>	<b>1.951.789.070,00</b>	<b>1.639.124.098,00</b>	<b>19,08</b>

<b>D.5.</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>
-------------	---------------------------

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp291.439.016,00 dan Rp296.580.135,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.995.499,00	167.587.022,00	-0,84
	Beban Pemeliharaan Jaringan	6.983.500,00	7.038.500,00	-0,78
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.460.017,00	121.954.613,00	-5,33
	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
	Beban Persediaan suku cadang	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>291.439.016,00</b>	<b>296.580.135,00</b>	<b>-1,73</b>

<b>D.6.</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>
-------------	-------------------------------

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp539.446.372,00 dan Rp451.619.910,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Beban Perjalanan Biasa	534.046.372,00	444.119.910,00	20,25
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	7.500.000,00	-28
	<b>Jumlah</b>	<b>539.446.372,00</b>	<b>451.619.910,00</b>	<b>19,45</b>

**D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp689.135.082,00 dan Rp891.540.327,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
	Beban Amortisasi Software	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	356.062.109,00	356.062.109,00	0,00
	Beban Penyusutan Irigasi	7.962.126,00	7.962.126,00	0,00
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10.234.133,00	89.422.741,00	-88,56
	Beban Penyusutan Jaringan	6.698.235,00	6.698.235,00	0,00
	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.746.778,00	1.746.778,00	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	300.206.701,00	423.423.338,00	-29,10
	<b>Jumlah</b>	<b>689.135.082,00</b>	<b>891.540.327,00</b>	<b>-22,70</b>

**D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.365.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban pos surplus/deficit dari kegiatan non operasional tahun 2022 menurun dibanding tahun 2022 karena Nilai Realisasi tahun 2022 tidak ada di bandingkan dengan Nilai Realisasi Tahun 2023

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<b>E.1.</b>	<b>Ekuitas Awal</b>
-------------	---------------------

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp15.215.129.785,00 dan Rp16.012.238.552,00

<b>E.2.</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>
-------------	---------------------------

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-6.455.387.930,00 dan Rp-661.524.786,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

<b>E.3.</b>	<b>Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b>
-------------	---

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.500.000,00.dan Rp-0,00

<b>E.3.1.</b>	<b>Koreksi Atas Reklasifikasi</b>
---------------	-----------------------------------

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

<b>E.4.</b>	<b>Transaksi Antar Entitas</b>
-------------	--------------------------------

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.835.490.348,00 dan Rp5.828.127.094,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

	<b>Jenis Koreksi</b>	<b>Nilai Koreksi 31 Desember 2023</b>
	Ditagihkan ke Entitas Lain	6.035.929.112,00
	Diterima dari Entitas Lain	200.438.764,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.236.367.876,00</b>

<b>E.4.1.</b>	<b>Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)</b>
---------------	--

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp6.035.922.112,00 sedangkan DKEL sebesar Rp200.438.764

<b>E.5.</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>
-------------	----------------------

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.597.732.203,00 dan Rp15.225.117.785,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
F.2.	Pengungkapan Lain-lain

- Adanya penambahan pegawai PPPK atas nama :Agus Sumardi